

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI PROVINSI BALI

I G. W. Murjana Yasa

ABSTRACT

Main development problem in developing country is the contradiction between unemployment and poverty. It is caused by the strong relation between both problem. Poverty in so many cases mostly started by the lack access of productive human source to the job field. The complexity of the problem drive the worldwide commitment in reducing poverty all over the world by the draft of development goals, called Millennium Development Goals (MDGs)

To promote the development, the effort to reduce poverty that mainly started by the unemployment must involve the society in participative platform. The participation pattern possibly reducing poverty to be more grounded, strengthen commitment between society in responsibility to reduce unwellfare . The local genius, for instance Lembaga Perkreditan Desa (LPD) that is own by the village association has the strategic role in reducing poverty trough the improvement of its social function beside the main function which is to improve the members welfare. The social function means the commitment and togetherness between member to institution and between members.

Keywords : Poverty, development, MDGs

1. Latar Belakang

Dua isu sentral masalah pembangunan yang masih menghantui Bangsa Indonesia saat ini adalah masalah pengangguran dan masalah kemiskinan. Kedua permasalahan ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam banyak kasus kemiskinan diawali dari kurangnya akses tenaga kerja produktif terhadap lapangan pekerjaan. Di lain sisi, kemiskinan menghambat akses terhadap pemenuhan pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya mutu sumber daya manusia.

Jebakan kemiskinan yang membelenggu penduduk miskin sebagai akar segala ketakberdayaan telah menggugah perhatian masyarakat dunia, sehingga isu kemiskinan menjadi salah satu isu sentral dalam Millenium Development Goals atau MDGs (UNDP, 2003). Kemiskinan diyakini sebagai akar permasalahan hilangnya martabat manusia, hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi, dan terjadinya degradasi lingkungan (Faturachman, dkk., 2007)

Terkait dengan kemiskinan, isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah masih relatif banyaknya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk yang relatif banyak ini terutama dikaitkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengentasannya, baik melalui pendanaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Namun demikian, upaya yang sedemikian tinggi kuantitasnya tersebut belum secara

signifikan dapat mengentaskan kemiskinan. Terlihat dari masih banyaknya jumlah penduduk miskin.

Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali, berdasarkan pendataan BPS mencapai 147.044 rumah tangga yaitu sekitar 17,15 persen dari total rumah tangga. Kabupaten Karangasem, Buleleng, Bangli dan Klungkung memiliki rumah tangga miskin yang relatif banyak. Di Kabupatn Karangasem malahan mencapai lebih dari 40 persen (Tabel 1)

Banyak faktor penyebab kemiskinan, baik eksternal maupun internal. Kenaikan harga BBM, yang memicu inflasi sangat menekan taraf hidup sebagian besar masyarakat, lebih-lebih masyarakat miskin. Mereka yang tadinya hampir miskin menjadi menurun taraf hidupnya sebagai akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada keluarga miskin serta kondisi lainnya yang tak memungkinkan mereka meraih berbagai fasilitas yang tersedia di pasaran. Pola pengentasan kemiskinan yang cenderung kurang mendidik seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang banyak menuai koreksi masyarakat, juga diduga memberi andil terhadap banyaknya masyarakat terutama kelompok abu-abu (hampir miskin) yang ingin tetap miskin agar mendapat bantuan.

Tabel 1 Jumlah Rumah Tangga Miskin di Provinsi Bali tahun 2005

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga*)	Rumah Tangga Miskin**)	% Rumah Tangga Miskin
1. Jembrana	65.840	6.998	10,63
2. Tabanan	99.949	11.672	11,68
3. Badung	98.700	5.201	5,27
4. Gianyar	91.248	7.629	8,36
5. Klungkung	39.840	8.460	21,23
6. Bangli	53.710	13.191	24,56
7. Karangasem	95.900	41.826	43,61
8. Buleleng	161.440	47.908	29,68
9. Denpasar	152.784	4.159	2,72
Bali	859.411	147.044	17,11

Sumber: *) Badan Pusat Statistik Jakarta. 2006

***) Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (BKKBN Prov. Bali, 2007)

Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan tersebut diperlukan terobosan pemikiran yang memungkinkan angka kemiskinan dapat ditekan sekaligus membelajarkan masyarakat bahwa adalah penting menjadi manusia kaya, setidaknya secara moral. Oleh karena itu orientasi terhadap pola pengentasan kemiskinan mesti lebih berbasis pada masyarakat di mana terjadi kemiskinan.

2. Kemiskinan dan Faktor Penyebabnya

2.1 Pengertian kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Ketakberdayaan penduduk miskin, menurut Mubyarto (1997), disebabkan mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan juga karena struktur sosial ekonomi tidak membuka peluang orang miskin ke luar dari lingkungan kemiskinan yang tak berujung pangkal.

Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan, Komite Penanggulangan Kemiskinan (2005) menegaskan pentingnya mendefinisikan kemiskinan dari pendekatan hak. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak ini mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan

tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Para ahli ekonomi mengelompokkan ukuran kemiskinan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut, diartikan sebagai suatu keadaan di mana tingkat pendapatan dari seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, permukiman, kesehatan, dan pendidikan. Ukuran ini terkait dengan batasan pada kebutuhan pokok atau kebutuhannya minimum. Sajogyo (1977) menyatakan bahwa untuk daerah perkotaan kebutuhan minimal perkapita setara dengan 420 kg beras per tahunnya, dan untuk daerah perdesaan 320 kg.

Kemiskinan relatif berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidakmerataan. Dalam kemiskinan relatif, seseorang yang telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya belum tentu disebut tidak miskin, karena apabila dibandingkan dengan penduduk sekitarnya ia memiliki pendapatan yang lebih rendah.

2.2 Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan, khususnya kemiskinan di kota erat kaitannya dengan langkanya peluang kerja yang produktif. Penduduk, baik pendatang (urbanis) maupun penduduk kota yang baru masuk angkatan kerja, dengan kemampuan yang mereka miliki menciptakan kesempatan kerja dengan memanfaatkan kehidupan kota.

Dipandang dari sudut ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari beberapa sisi,

- 1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi yang timpang. Penduduk miskin memiliki sumberdaya terbaas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
- 3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.
- 4) Di daerah perkotaan, derasnya arus migran masuk juga memberi dampak terhadap semakin banyaknya penduduk dalam katagori miskin. Prilaku para migran dalam kehidupan kota yang sedemikian rupa, yakni pengeluaran yang serendah-rendahnya di daerah tujuan (kota) agar dapat menabung untuk dapat

di bawa pulang ketika mereka mudik ke kampung halaman (daerah asal). Para migran memanfaatkan hanya sebagian kecil pendapatannya mereka untuk pegeluaran di daerah tujuan, disamping memang sebagian besar dari mereka berpendapatan rendah karena kualitas sumberdaya manusianya juga rendah. Munculnya permukiman kumuh adalah salah satu ciri kemiskinan perkotaan.

- 5) Di daerah perkotaan, terputusnya akses pengairan di sebagian subak-subak, berdampak pada perubahan perilaku petani. Apabila petani tidak dapat segera mengantisipasi perubahan tersebut, mereka akan kesulitan untuk melakukan aktivitas produktif di pertanian. Optimalisasi lahan yang telah terputus akses pengairannya perlu segera dipolakan agar kemanfaatannya oleh petani dan masyarakat perkotaan dapat dirasakan.

3. Efektivitas Berbagai program penanggulangan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks. Banyak faktor yang berperan menjadi penyebab kemiskinan. Ketidakberuntungan (disadvantages) yang melekat pada keluarga miskin, keterbatasan kepemilikan aset (poor), kelemahan kondisi fisik (physically weak), keterisolasian (isolation), kerentanan (vulnerable), dan ketidakberdayaan (powerless) adalah berbagai penyebab mengapa keluarga miskin selalu kekurangan dalam memenuhi dasar hidup, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan layak untuk anak-anaknya. Kondisi serba kekurangan dari masyarakat miskin tersebut menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya. Selain itu, kultur kemiskinan yang masih kental dalam masyarakat dengan budaya tolong-menolong, pada satu sisi dapat bersifat positif, namun di sisi yang lain juga dapat mengaburkan arti kemiskinan yang sebenarnya. Orang yang sebenarnya sangat miskin, merasa tidak terlalu miskin karena bantuan sosial di sekelilingnya. Kondisi kemiskinan juga menjadi diperparah karena kewajiban sosial yang ditanggung keluarga miskin, seperti kewajiban menyumbang. Situasi yang seperti ini menyebabkan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan pedesaan menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya (Umi Listyaningsih, 2004).

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini menunjukkan keseriusan dalam penanggulangan kemiskinan. Mulai dari program yang ditujukan untuk petani, melalui berbagai skim kredit dan subsidi, sampai pada berbagai program pemberdayaan untuk keluarga miskin, seperti pemberian dana bergulir, program ekonomi produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Namun

berbagai program tersebut belum secara signifikan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin, sehingga memunculkan pertanyaan mengapa banyak program penanggulangan kemiskinan tidak efektif? atau bagaimana bentuk program penanggulangan kemiskinan yang efektif?

Kelemahan berbagai program penanggulangan kemiskinan, diawali dari beberapa persoalan berikut.

- 1) Program yang dilaksanakan berpedoman pada perguliran dana bantuan. Karena konsepnya adalah bergulir, logikanya yang mampu mengikuti program tersebut adalah mereka yang memiliki usaha produktif, dan kecil kemungkinan masyarakat yang benar-benar miskin dapat mengikuti program dana bergulir.
- 2) Kecilnya peluang rumah tangga miskin ikut dalam pola perguliran disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, sehingga sangat beresiko terhadap keberhasilan program.
- 3) Adanya gejala ketidaktepatan pendataan penduduk miskin, yang terutama dilakukan petugas desa (banjar) yang cenderung pilih kasih, sehingga data penduduk miskin untuk penanggulangan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran.
- 4) Kecenderungan adanya pemilihan daerah sasaran program dengan harapan tingkat keberhasilannya dapat lebih diukur. Hal ini berakibat pula pada salah sasaran.
- 5) Sikap menal penduduk miskin yang cenderung pasrah, menerima apa adanya, merasa miskin adalah nasib, takdir dan lainnya adalah sikap mental yang menghambat program kemiskinan.
- 6) Program-program yang cenderung memberi 'ikan', bukan kail dan atau cara memancing dapat menggeser perilaku masyarakat yang justru ingin menjadi miskin agar mendapat bantuan kemiskinan, bukan justru berupaya bagaimana mereka dapat ke luar dari kemiskinan.

4. Membangun komitmen Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat

Penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan memanfaatkan keunggulan lokal adalah salah satu solusi yang dapat diberikan dalam penanggulangan kemiskinan. Konsepnya adalah membangun desa secara terintegrasi. Tanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan, terletak pada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Melalui cara ini, peran pemerintah lebih pada fasilitator.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan

sesuai dengan UUD 1945 adalah sistem ekonomi yang demokratis. Artinya tujuan pencapaian kesejahteraan dalam masyarakat dilakukan dengan cara yang demokratis.

Beberapa prinsip dalam ekonomi kerakyatan adalah 1) strategi pembangunan yang memihak rakyat; 2) prinsip pedoman pembangunan atas dasar musyawarah mufakat; 3) prinsip keterpaduan mekanisme pembangunan antara kepentingan masyarakat lokal dan kepentingan nasional; 4) prinsip koordinasi secara lintas sektor dan lintas daerah; 5) prinsip pelestarian pembangunan yang diselenggarakan melalui proses pembiayaan pembangunan, pemantauan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh rakyat.

Tujuan pengembangan ekonomi rakyat adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat dapat terwujud apabila pembangunan mengarah ke perubahan struktur masyarakat. Perubahan diawali dari proses peningkatan produksi dan distribusi yang selanjutnya dapat membuka kesempatan kerja.

Kesempatan kerja dapat menciptakan peningkatan pendapatan dan tabungan yang selanjutnya dapat digunakan untuk pemupukan modal bagi perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini pada gilirannya kembali akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Perubahan struktural ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumberdaya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, pemberdayaan sumberdaya manusia.

Dalam rangka perubahan struktural, beberapa langkah strategis yang perlu diambil adalah 1) akses lebih luas kepada aset produksi khususnya akses pada dana; 2) perkuatan posisi transaksi dan kemitraan usaha dengan menekankan pentingnya kebersamaan dan kesatuan; 3) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan (termasuk peningkatan gizi) dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia menuju peningkatan produktivitas; 4) kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar. Industri-industri kecil dan menengah yang kuat akan dapat menjadi tulang punggung perekonomian. Proses dimulai dari daerah pedesaan dengan memanfaatkan potensi setempat; 5) mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal munculnya wirausaha kecil dan menengah yang kuat; 6) pemerataan pembangunan antar daerah.

Model pembangunan ekonomi rakyat adalah model pembangunan partisipatif. Prinsip pembangunan partisipatif adalah sebagai berikut.

- Visi, misi, strategi dan aksi pembangunan untuk rakyat
- Sasaran pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat
- Mekanisme perencanaan merupakan perpaduan

perencanaan aliran bawah (bottom-up) dan aliran atas (top-down)

- Tim Pembina pembangunan sebagai koordinator menggerakkan pembangunan lintas sektor dan lintas daerah serta pengendalian proses pembangunan
- Instrumen pembangunan sebagai wahana pemihakan kepada rakyat melalui sumber pembiayaan yang jelas, APBN, APBD Provinsi, APBD, Investasi Swasta, dan Swadaya Masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi rakyat dalam kerangka pengentasan kemiskinan sangatlah penting untuk mengetahui potensi ekonomi lokal dari berbagai sektor, selain juga perlunya mengetahui potensi sumberdaya manusianya. Potensi ekonomi lokal meliputi usaha menengah mikro dan usaha kecil.

Secara kelembagaan, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan mengambil kewilayah seperti di Bali bisa Desa atau Banjar Adat. Untuk lingkup yang lebih luas dapat dikembangkan menjadi sentra ekonomi rakyat tingkat kecamatan. Pentingnya menggunakan pendekatan kewilayah desa adat disebabkan, desa adat telah memiliki pranata sosial yang relatif lengkap. Di wilayah desa adat telah terdapat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Koperasi yang dapat mewakili pranata di bidang keuangan dan pembiayaan; Pasar Tradisional Desa (dari aspek pemasaran), Koperasi Unit Desa (KUD) untuk pemasaran dan penyediaan input yang lebih modern; Organisasi Subak sebagai sebagai entry point pengembangan produk pertanian (dari aspek produksi khususnya pertanian). Sentra-sentra industri kerajinan (dari aspek produksi industri kerajinan), Sentra-sentra Industri pengolahan (aspek produksi dari industri pengolahan). Dari sisi kelembagaan, revitalisasi pengembangan sistem ekonomi rakyat dapat dilakukan melalui pemberdayaan berbagai pranata sosial yang telah ada tersebut dan mengatur mekanisme kerjanya sesuai prinsip pengembangan ekonomi rakyat. Gambar 1 menunjukkan keterkaitan antara aspek kelembagaan (lembaga pembiayaan) sebagai subsistem ekonomi desa dengan subsistem ekonomi desa lainnya lainnya, seperti UMKM, kelompok ternak dan lainnya.

Demokrasi dalam ekonomi pedesaan terkait dengan pengadaan input, proses produksi, output yang dihasilkan serta bagaimana pembiayaannya dapat diputuskan melalui sangkep. Sebagai bagian atau subsistem dari ekonomi kerakyatan lembaga keuangan (LPD, KUD atau lembaga keuangan lainnya) dapat menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan, pengembangan output dapat dilakukan melalui sentra-sentra produksi. Pasar Tradisional Desa Adat, KUD dan juga Pasar modern sebagai sub sistem pemasaran dapat memfasilitasi kebutuhan pasar dari produk yang dihasilkan. Sebagai keseluruhan, semua subsistem ini

bekerja sedemikian rupa sehingga ada keseimbangan dan kesinambungan. Tidak satupun dari pranata sosial ini yang tidak berfungsi untuk menghindarkan kepincangan dalam bekerjanya sistem ekonomi kerakyatan.

Institusi terkait dapat berperan mulai dari input, proses, output maupun pasar melalui Tim yang terkoordinatif. Tim pembina hanyalah sifatnya memberikan pembinaan dan fasilitasi apabila diperlukan dan memastikan semua subsistem dapat bekerja seperti yang diharapkan melalui aktivitas monitoring dan evakuasi. Bantuan pembiayaan dapat disalurkan melalui lembaga yang sudah ada. Dengan cara ini diharapkan dapat mengeliminir kekuatan ekonomi luar yang dapat mengikis kekuatan ekonomi lokal, tetapi sebaliknya secara bertahap dapat merubah struktur ekonomi dari tradisional ke modern, dari ketergantungan ke kemandirian, dari lemah menjadi kuat sehingga dapat menjadi tulang punggung ekonomi.

Dalam kerangka pengentasan kemiskinan, harus diasumsikan bahwa ekonomi rakyat sebenarnya sudah ada, tinggal dibangkitkan sehingga dapat bekerja sebagai satu sistem, di mana didalamnya bekerja berbagai sub sistem dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sub-sub sistem tersebut meliputi: keuangan, sistem distribusi (Pasar), sistem produksi, Tim Pembina bertugas untuk menggerakkan sub-sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan fungsional sesuai prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan.

Peluang besar dimiliki oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam penanggulangan kemiskinan. LPD milik desa pekraman yang melingkupi hampir seluruh desa pekraman di Bali, selain memiliki fungsi ekonomi (mencari untung) juga memiliki fungsi sosial. Melihat fenomena yang dihadapi LPD saat ini yaitu kelebihan kapasitas, maka pengembangan fungsi sosial dapat menjadi pilihan strategis sembari mengembangkan ekonomi produktif untuk peningkatan penyerapan dana oleh masyarakat.

Peran sosial dibangun dengan mengambil komitmen masyarakat melalui sangkep. Kerama kurang mampu diprioritaskan memperoleh bantuan dana murah yang dapat disalurkan dengan bunga 5 – 10 persen setahun khususnya terhadap rumah tangga miskin yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha. Terhadap rumah tangga miskin yang renta atau secara fisik kesulitan melakukan aktivitas produktif, kerama dapat meningkatkan komitmennya dengan mengambil sebagian keuntungan LPD untuk membantu mereka. Melalui pola ini pengentasan kemiskinan akan terbangun melalui komitmen masyarakat. Bagi masyarakat miskin yang potensi dikembangkan akan muncul rasa 'jengah' untuk maju, membangun harkat dan martabat.

Model pemberdayaan dengan mengedepankan

partisipasi masyarakat khususnya di daerah perkotaan harus dilakukan secara terintegrasi dan koordinatif. Model tersebut telah dikembangkan di beberapa kota di Indonesia melalui program P2KP. Hasil penelitian mengenai dampak program ini di Yogyakarta dikatakan cukup berhasil, walaupun diperlukan pembenahan khususnya terkait kelembagaan (Faturachman, dkk., 2007). Di Bali pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui pengembangan ekonomi rakyat dengan menempatkan desa (pekraman) sebagai pusat pengembangan partisipasi masyarakat. LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang ada di masing-masing desa pekraman memiliki peran penting dalam mengembangkan fungsi sosial LPD. Penguatan komitmen terhadap kerama miskin aka sekaligus membangun demokrasi ekonomi dan pembelajaran untuk masyarakat secara keseluruhan, tidak saja untuk masyarakat miskin. Penguatan komitmen ini, sekaligus juga memperkuat komitmen kerama terhadap desa adat dan kelembagaan LPD. Model seperti ini, disambut para Ketua LPD se Kota Denpasar dan beberapa Kabupaten di Bali beserta Bendesa Desa Pekraman dalam kerangka revitalisasi peran LPD dalam pembangunan desa. (Tim Pengabdian Masyarakat Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Unud, 2008).

5. Penutup

Penanggulangan pengangguran perlu melibatkan masyarakat secara partisipatif. Melalui pola partisipatif lebih memungkinkan proses pembelajaran masyarakat, sekaligus proses perubahan perilaku untuk hidup yang lebih bermartabat. Pola ini juga memungkinkan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan lebih mendasar, menguatkan komitmen kebersamaan diantara masyarakat bahwa penanggulangan kemiskinan bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, tetapi justru menjadi tanggung jawab bersama.

Lokal genius, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) milik desa pekraman memiliki peran sangat strategis dalam penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan fungsi sosialnya. Peningkatan fungsi sosial ini tidak saja dapat menguatkan tujuan LPD yaitu peningkatan kesejahteraan anggota, tetapi juga meningkatkan komitmen dan kebersamaan para anggota terhadap LPD dan antar anggota (sesama). 'Sangkep' kerama adat dalam memutuskan peningkatan peran sosial terhadap anggota yang kurang mampu juga berarti mengembangkan demokrasi ekonomi. Pola ini membutuhkan komitmen tinggi pengurus LPD dan juga Bendesa Desa Pekraman yang selanjutnya memotivasi anggota akan pentingnya menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.

Daftar Pustaka

- Chambers. 1987. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES
- Faturochman, dkk. 2007. *Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia. 2005. *SNPK Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Mubyarto. 1997. *Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa Tenggara*. Yogyakarta: Aditya Media
- Tim Pengabdian Masyarakat Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Unud. 2008. *Revitalisasi Peran Lembaga Perkreditan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Denpasar
- Umi Listyaningsih. 2004. *Dinamika Kemiskinan di Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada dan Partnership for Economic Growth (PEG), USAID

I G. W. Murjana Yasa, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FE Unud Periode 2008-2012, menyelesaikan studi S2 dan S3 di UGM Yogyakarta, dengan konsentrasi pada bidang kependudukan. Selain menjadi staf ahli bidang ekonomi Pemerintah Kota Denpasar dan DPRD Propinsi Bali, juga aktif melakukan penelitian di bidang ekonomi kependudukan dan UMKM, antara lain: Pengembangan Sistem Informasi dan Penelitian Pengangguran di Provinsi Bali; serta Pemetaan Profil BPR dalam Rangka Penyusunan Stratifikasi Industri BPR di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Denpasar.